



# Alokasi Anggaran MBG Dialihkan ke Infrastruktur

## MENJAGA MUTU MAKANAN MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya menjaga mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

### Upaya Menjaga Mutu



### Progres program MBG Data BGN per 31 Agustus 2025



**SLEMAN**—Pemerintah daerah di DIY mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah dianggarkan di APBD ke program lainnya seperti infrastruktur.

David Kurniawan, Yosef Leon, Andreas Yuda Pramono  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

- ▶ Anggaran MBG dialihkan untuk menutup defisit APBD dan untuk mencukupi program-program antara lain rehab sekolah, perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi.
- ▶ Tidak ada masalah dengan adanya perubahan program kegiatan dari MBG ke program yang lain.

Langkah ini dilakukan karena anggaran MBG semuanya sudah diungkap oleh Pemerintah Pusat. Di Sleman, anggaran MBG yang berada di pos belanja tidak terduga (BTT) didistribusikan untuk 27 urusan pembangunan. Paling besar, anggaran digunakan untuk menutup defisit APBD 2025.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, mengatakan besaran anggaran program MBG mencapai Rp76,3 miliar. Angka persisnya Rp76.373.396.658.

"Yang jelas anggaran MBG akhirnya dialihkan untuk menutup defisit APBD dan untuk mencukupi program-program antara lain rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi, penerangan jalan umum, premi BPJS Kesehatan, serta hibah KONI dan NPC [untuk penyelenggaraan Porda XVII]," kata Abu, Kamis (18/9).

Menurut Sekda Sleman, Susmiarto,

pergeseran anggaran MBG ke 27 urusan pembangunan telah mempertimbangkan kebutuhan. "Kami sudah memperhatikan pendapatan dan pengeluaran agar seimbang," kata Susmiarto.

Langkah serupa dilakukan Pemkab Gunungkidul. Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada 23 sekolah yang diperbaiki menggunakan anggaran MBG dari APBD Kabupaten. Total pagu yang disediakan Pemkab untuk program ini sebesar Rp12 miliar.

"Rinciannya ada 12 SD, tujuh SMP dan empat PAUD atau TK yang diperbaiki menggunakan anggaran MBG dari kabupaten," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subariyanto.

Ia menjelaskan program perbaikan sudah dijalankan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing sekolah.

## Alokasi Anggaran...

"Anggaran rata-rata dari Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Pagu disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing sekolah," katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan total pagu disediakan yang seyogyanya dipergunakan untuk MBG sebesar Rp12 miliar.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istiril Widilastuti, menjelaskan anggaran MBG Rp31 miliar telah dialihkan untuk menutup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). "Di pembahasan APBD 2025 kami memang sempat menganggarkan Rp31 miliar untuk program MBG. Namun setelah keluar aturan terbaru yang menyebut Pemerintah Pusat menanggung semua biaya MBG, anggaran itu kemudian kami alihkan untuk menutup Silpa," ujar Istiril.

Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Bantul, Surana Nugraha, menyebut Silpa APBD murni 2025 tercatat Rp160 miliar setelah anggaran MBG dialihkan ke pos itu. Dana itu kemudian tersebar di sejumlah pos, termasuk rumah sakit dan beberapa kegiatan di OPD. Menurutnya, pengalihan anggaran dilakukan agar postur APBD tetap seimbang. "Peruntukannya sudah dibahas lagi untuk disebar ke sejumlah OPD sesuai kebutuhan," jelas

Surana.

### Sektor Lain

Sementara itu, alokasi anggaran MBG di Kulonprogo yang sudah dialihkan ke sektor lain ditetapkan dalam APBD perubahan 2025.

Sekda Kulonprogo, Triyono, menjelaskan anggaran MBG sekitar Rp14 miliar sudah direalokasi ke sektor lain. Alokasi anggaran MBG tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program OPD termasuk untuk DPRD Kulonprogo. Namun, tentunya semuanya dilihat sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Ketika realokasi anggaran MBG tidak cukup sehingga tidak bisa dipaksakan. "Kalau tidak cukup dirasionalisasi usulannya sehingga hasil akhir harus balance antara uang yang ada dengan program kegiatan yang tertuang di APBD," jelasnya.

Anggota Banggar DPRD Kulonprogo, Agung Raharjo mengungkapkan anggaran MBG itu untuk mendanai program pembangunan yang mengalami efisiensi. Salah satunya untuk 11 paket jalan dan JPO yang dilaksanakan tahun ini. Namun jumlah itu tidak menampung semuanya, hanya sebagian sehingga ada yang tidak mendapat penganggaran. "Sayangnya penyerapannya dari anggaran MBG itu lambat sampai saat ini," untkapnya. Menurutnya, harusnya dimulai Februari sampai Maret tetapi baru dimulai September ini sehingga lambat dalam penyerapan.

Di Kota Jogja, realisasi program MBG menggunakan alokasi APBN. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk MBG menjadi beberapa program prioritas.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Darini menuturkan anggaran untuk MBG yang sebelumnya bersumber dari APBD tidak lagi digunakan seperti rencana awal. Alokasi anggaran dari APBD tersebut kini dialokasikan dalam berbagai program prioritas yang selaras dengan arahan Pemerintah Pusat dan kebutuhan Kota Jogja.

Darini menjelaskan awalnya dana tersebut tercatat sebesar Rp100 miliar dan ditempatkan di pos BTT. Namun, karena tidak digunakan untuk program MBG, anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas Kota Jogja, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah.

"Alokasi terbesar memang diarahkan ke pendidikan dan kesehatan, terutama untuk memperkuat Jaminan Pendidikan Daerah [JPD]. Jadi APBD kita digeser untuk mendukung program-program yang menjadi unggulan pusat dan juga prioritas Kota Jogja," ujar Darini, Kamis.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat agar anggaran APBD tidak dipakai untuk MBG, melainkan disesuaikan dengan program prioritas nasional dan kebutuhan daerah. (Stefani

Yulindriani & Khairul Ma'arif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005